

**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, KEJELASAN
SASARAN ANGGARAN, PARTISIPASI ANGGARAN,
DESENTRALISASI DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP KINERJA MANAJERIAL
(Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten
Magelang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh :
Ghany Dede AR Rauf
NIM. 14.0102.0101

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, KEJELASAN
SASARAN ANGGARAN, PARTISIPASI ANGGARAN,
DESENTRALISASI DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP KINERJA MANAJERIAL
(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten
Magelang)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**



Disusun Oleh :
Ghany Dede AR Rauf
NIM. 14.0102.0101

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

SKRIPSI

**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN,
PARTISIPASI ANGGARAN, DESENTRALISASI DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP KINERJA MANAJERIAL
(Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Magelang**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

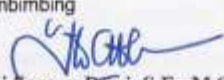
Ghany Dede AR Rauf

NPM 14.0102.0101

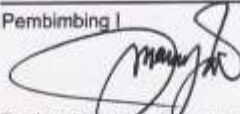
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal **28 Agustus 2018**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing


Veni Soraya Dewi, S.E., M.Si

Pembimbing I


Faqiatul Mariya Waharini, S.E., M.Si

Pembimbing II

Tim Penguji


Siti Noor Khikmah, S.E., M.Si

Ketua


Barkah Susanto, S.E., M.Sc

Sekretaris


Veni Soraya Dewi, S.E., M.Si

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal


15 SEP 2018
Dra. Marlina Kurnia, M.M

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ghany Dede AR Rauf

NIM : 14.0102.0101

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, KEJELASAN SASARAN
ANGGARAN, PARTISIPASI ANGGARAN, DESENTRALISASI DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA
MANAJERIAL (STUDI EMPIRIS PADA OPD DI KABUPATEN
MAGELANG)**

adalah benar-benar hasil karya Saya sendiri dan bukan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 20 Agustus 2018

METERAI
TEMPEL

E1984AFF271065845

6000
ENAM RIBU RUPIAH

at pernyataan,



Ghany Dede AR Rauf

NIM 14.0102.0101

RIWAYAT HIDUP

Nama : Ghany Dede AR Rauf
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 11 January 1995
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jl. Bakti Adi Guna Bulukumba
Sulawesi Selatan
Alamat Email : ghany.dede11@gmail.com
Pendidikan Formal:
Sekolah Dasar (2001-2007) : SD Negeri 322 Bulukumba
SMP (2007-2010) : SMP Negeri 1 Bulukumba
SMK (2010-2013) : SMK Negeri 1 Bulukumba
Perguruan Tinggi (2014-2018) : S1 Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Magelang

Pendidikan Non Formal:

- *Basic Listening and Speaking Course* di UMMagelang Language Center
- Pelatihan Dasar Keterampilan Komputer di UPT Pusat Komputer UMMagelang

Pengalaman Organisasi :

- Anggota dan Pengurus (HMA) (2014-2015)
- Anggota dan Pengurus (BEM FE) (2015-2016)

Magelang, 18 Agustus 2018
Peneliti



Ghany Dede AR Rauf
NIM.14.0102.0101

MOTTO

“Jangan Takut Melangkah Karena Jarak 1000 mil dimulai dengan 1 langkah”.

(Ghany)

“Kita Boleh Kehilangan Apapun Tapi Kita Tidak Boleh Kehilangan Harapan”

(Dede)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka mana kala kamu telah selesai (dari urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

Bersemangatlah untuk mengerjakan apa-apa yang bermanfaat bagimu, serta mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah lemah

(H.R Muslim)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PARTISIPASI ANGGARAN, DESENTRALISASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA MANAJERIAL (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang)”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama Penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penuliti ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Veni Soraya Dewi, SE.M.Si selaku dosen pembimbing 1 (satu) yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
2. Ibu Faqiatul Mariya Waharini, SE.M.Si selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
3. Ibu Nur Laila Yuliani, S.E, MSc, AK selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan dosen penguji 1 (satu) ujian proposal yang sudah banyak membantu memeberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
4. Ibu Yulinda Devi Pramita, S.E, Msc selaku dosen penguji 2 (dua) ujian proposal yang sudah banyak membantu memeberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
5. Ibu Siti Noor Khikmah, SE., M.Si selaku dosen penguji 1 (satu) ujian skripsi yang sudah banyak membantu memeberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
6. Bapak Barkah Susanto, SE, M.Sc, AK selaku dosen penguji 2 (dua) ujian skripsi yang sudah banyak membantu memeberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
7. Kedua orangtua tercinta penulis, yang telah memberikan doa, dukungan dan motivasi dalam menuntut ilmu hingga terselesainya skripsi ini.

Penulis hanya bisa mendoakan, semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda serta diterima oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun, penyusun harapkan untuk perbaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Surat Pernyataan Keaslian	iii
Halaman Riwayat Hidup	iv
Moto.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar/grafik	ix
Daftar Lampiran	x
Abstrak	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	
A. Telaah Teori	11
1. Agency Theory	11
2. Stewardship Theory	11
3. Akuntabilitas Publik	13
4. Kejelasan Sasaran Anggaran	13
5. Partisipasi Anggaran	13
6. Desentralisasi	14
7. Sistem Pengendalian Internal	14
8. Kinerja Manajerial	14
B. Telaah Penelitian Sebelumnya	14
C. Perumusan Hipotesis	16
D. Model Penelitian	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Populasi dan Sampel	24
B. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	25
1. Jenis dan Sumber Data	25
2. Teknik Pengumpulan Data	25

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	26
1. Kinerja Manajerial	26
2. Akuntabilitas Publik	26
3. Kejelasan Sasaran Anggaran	26
4. Partisipasi Anggaran.....	27
5. Desentralisasi	27
6. Sistem Pengendalian Internal	28
D. Alat Analisis Data	28
1. Statistik Deskriptif	28
2. Uji Kualitas Data	28
3. Uji Regresi Linier Berganda	31
4. Pengujian Hipotesis	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Sampel Penelitian	35
B. Statistik Deskriptif Responden	35
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	37
D. Uji Kualitas Data	40
E. Pengujian Hipotesis	45
F. Pembahasan	51
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	60
B. Keterbatasan Penelitian	61
C. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	LAKIP dan Opini Audit Kabupaten Magelang tahun 2012-2016...	2
Tabel 2	Telaah Penelitian Sebelumnya	14
Tabel 3	Telaah Penelitian dan Pengukuran Variabel	26
Tabel 4.1	Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian	35
Tabel 4.2	Deskripsi Responden	36
Tabel 4.3	Statistik Deskriptif	38
Tabel 4.4	Pengujian Validitas.....	40
Tabel 4.5	Tabel <i>Cross Loading</i>	41
Tabel 4.6	Pengujian Reliabilitas	43
Tabel 4.7	Hasil Regresi	44
Tabel 4.8	Uji R^2	45
Tabel 4.9	Uji F	46
Tabel 4.10	Uji t	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2	Model Penelitian	23
Gambar 3	Penerimaan Uji F	33
Gambar 4	Penerimaan Uji t	34
Gambar 4.1	Uji F	47
Gambar 4.2	Penerimaan hipotesis akuntabilitas publik	48
Gambar 4.3	Penerimaan hipotesis kejelasan sasaran anggaran	49
Gambar 4.4	Penerimaan hipotesis partisipasi anggaran	49
Gambar 4.5	Penerimaan hipotesis Desentralisasi	50
Gambar 4.6	Penerimaan hipotesis Sistem Pengendalian Internal	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner	65
Lampiran 2	Daftar OPD yang dijadikan Sampel dan Jumlah Kembali	74
Lampiran 3	Tabulasi Data Mentah	76
Lampiran 4	Tabulasi Data yang Diolah	90
Lampiran 5	Statistik Deskriptif	104
Lampiran 6	Uji Validitas	105
Lampiran 7	Uji Reliabilitas	113
Lampiran 8	Hasil regresi	115
Lampiran 9	Bukti Permohonan Ijin Riset ke pada Kesbangpol	117
Lampiran 10	Surat Permohonan Ijin Riset ke pada OPD	118
Lampiran 11	Surat Rekomendasi Survey/Riset	119
Lampiran 12	Bukti Penyebaran Kuisisioner	120
Lampiran 13	Daftar Identitas Responden	124
Lampiran 14	Tabel F	130
Lampiran 15	Tabel t	126

ABSTRAK

PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PARTISIPASI ANGGARAN, DESENTRALISASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA MANAJERIAL

(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang)

Oleh:

Ghany Dede AR Rauf

Kinerja Manajerial adalah hasil dari aktivitas manajerial yang efektif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial. Metode pengumpulan data menggunakan metoda *purposive sampling*. Sampel penelitian ini adalah 69 pegawai di OPD Kabupaten Magelang. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan Desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Kata kunci : Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Anggaran, Desentralisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kinerja Manajerial

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi pemerintah yang terjadi di Indonesia telah membawa banyak perubahan besar, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun penyelenggaraan pemerintah. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah membawa dampak perubahan yang mendasar dalam sisi pemerintahan yaitu diberlakukannya otonomi daerah. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah dibidang *fiscal*.

Penetapan dari Undang-Undang tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang terakhir di amandemen dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dianggap sebagai pusat pertanggungjawaban (Akuntabilitas Publik) yang merupakan *street bureaucrat* atau organisasi pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Pemerintahan daerah terutama pada Organisasi

Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA-OPD) dalam satu tahun. Dalam penyusunan anggaran diharapkan tidak terjadi *over budgeting*, sehingga dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), lebih mengedepankan rasionalitas kebutuhan belanja publik maupun belanja aparatur.

Berdasarkan sumber (www.menpan.go.id) pada tahun 2011, Provinsi Jawa Tengah memperoleh penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) yang sudah menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mendapatkan predikat B (baik), namun demikian akuntabilitas tersebut tidak diikuti oleh Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, salah satu contohnya adalah Kabupaten Magelang yang mendapat predikat CC (cukup baik).

Untuk menilai kinerja manajerial pemerintah daerah Kabupaten Magelang dapat dilihat dari hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selama 5 tahun terakhir dari tahun 2012-2016. Kemudian untuk menilai kinerja pemerintah daerah Kabupaten Magelang dapat dilihat dari hasil opini audit selama 5 tahun terakhir dari tahun 2012-2016

Tabel 1
Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Dan Opini BPK terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Magelang dari tahun 2012-2016

Tahun Anggaran	2012	2013	2014	2015	2016
Hasil Evaluasi LAKIP	CC	CC	CC	CC	CC
Opini Audit	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP

Sumber : www.bpkp.go.id

Sumber : semarang.bpk.go.id

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil evaluasi LAKIP Pemerintah Kabupaten Magelang dari tahun 2012 sampai dengan 2016 belum mengalami kenaikan masih memperoleh nilai CC dimana dalam indikator-indikator penilaian LAKIP belum tercapai secara optimal. Berdasarkan hasil diatas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang belum sesuai target yang diinginkan yaitu B. Selain itu Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2016 mendapat opini audit dari BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah kembali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LHP tersebut berturut-turut diserahkan kepada ketua DPRD Kabupaten Magelang. Kriteria yang menjadi dasar penentuan opini audit antara lain kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta efektivitas sistem pengendalian internal (SPI). Untuk dapat meningkatkan opini di tahun selanjutnya, pemerintah daerah harus mempelajari dan menindaklanjuti rekomendasi BPK yang telah disampaikan melalui LHP. Dengan demikian diharapkan laporan keuangan di tahun anggaran selanjutnya telah sesuai asas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta telah dilakukan langkah perbaikan atas Sistem Pengendalian Intern yang menjadi sorotan BPK. (semarang.bpk.go.id)

Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 tahun 2016 tentang kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Magelang tahun 2016, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2015 tentang kebijakan pengawasan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah tahun 2016, inspektorat kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah. Pelaksanaan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Magelang. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya Sistem Pengendalian Internal yang efektif dapat berdampak positif terhadap kinerja manajerial.

Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2002) adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika pertanggungjawaban dan menjalankan program atau kegiatan pemerintah daerah dengan baik, maka kinerja aparat pemerintah juga baik. Hal ini didasari dari penelitian Wibowo (2017), Asrini (2017) dan Aini (2016) menyatakan akuntabilitas

berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Sedangkan dari penelitian Solekhah (2017) dan Candrakusuma (2017) akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Kejelasan sasaran anggaran menurut Kenis (1979), merupakan tingkat kejelasan tujuan anggaran agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Semakin baik kejelasan sasaran anggaran maka kinerja pemerintah yang dihasilkan oleh pemerintah juga akan semakin meningkat. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran maka aparat juga dapat menentukan target dalam mencapai anggaran dan merumuskan apa saja yang akan dilakukan sehingga apa yang telah dilakukan pada awalnya dapat terealisasi dengan baik. Hal ini didasari dari penelitian Wibowo (2017), Candrakusuma (2017), Asrini (2017), Aini (2017) dan Matondang (2017) menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Sedangkan dari penelitian Solekhah (2017) menyatakan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Partisipasi anggaran menurut Nafarin (2007) adalah tingkat keterlibatan dan pengaruh individu dalam menentukan dan menyusun anggaran yang ada dalam divisi atau bagiannya, baik secara periodik maupun tahunan. Adanya partisipasi aparat pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran pemerintah daerah menunjukkan tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah yang terlibat dalam proses penganggaran. Ketika suatu tujuan atau sasaran yang dirancang secara

partisipatif disetujui, maka para penyusun akan mempertanggungjawabkan dan memiliki kesungguhan untuk mencapainya. Hal ini didasari dari penelitian Wibowo (2017), Asrini (2017) dan Matondang (2017) menyatakan partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Sedangkan dari penelitian Solekhah (2017) dan Candrakusuma (2017) tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Menurut Suwandi (2013) desentralisasi adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Diharapkan dengan adanya otonomi daerah, tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat semakin baik dan meningkatkan kinerja manajerial pada suatu organisasi. Hal ini didasari dari penelitian Wibowo (2017) menyatakan desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Sedangkan dari penelitian Solekhah (2017) menyatakan desentralisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Sistem Pengendalian Internal menurut Arens (2008) adalah proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dan sasaran dalam kategori sebagai berikut: (1) keandalan laporan keuangan, (2) epektivitas dan efisiensi dari operasional, (3) pemenuhan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang bisa diterapkan. Dengan adanya pengendalian intern maka seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap

organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini didasari dari penelitian Candrakusuma (2017), Chintya (2017) dan Putri (2013) menyatakan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Penelitian ini termotivasi dari penelitian Asrini (2017) tentang pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, dan partisipasi anggaran, terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Asrini (2017) adalah sama-sama meneliti tentang kinerja manajerial. Perbedaan peneliti ini dengan peneliti sebelumnya yakni:

Pertama, penelitian menambah variabel independen tentang Desentralisasi. Dengan adanya otonomi daerah, tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat semakin baik dan meningkatkan kinerja manajerial pada suatu organisasi sehingga Pemerintahan di Kabupaten Magelang lebih terdesentralisasi. Penambahan tersebut mengacu pada penelitian Wibowo dan Handayani (2017) tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah Kota Surabaya.

Kedua, penelitian juga menambah variabel independen tentang Sistem Pengendalian Internal. Dengan adanya pengendalian intern maka seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap organisasi dalam rangka memberikan keyakinan

yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu dengan adanya Sistem Pengendalian Internal pemerintah akan menciptakan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan peraturan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah, sehingga mampu membantu kinerja manajerial disetiap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Magelang. Penambahan tersebut mengacu pada penelitian Candrakusuma (2017) tentang Dampak komitmen organisasi, sistem pengendalian intern pemerintah, akuntabilitas publik, partisipasi anggaran, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sragen.

Ketiga, penelitian akan dilaksanakan di setiap Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Magelang. Dikarenakan dalam pengelolannya Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang masih banyak yang belum terserap sehingga tidak mencapai visi dan misi dalam suatu organisasi.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
3. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
4. Apakah struktur desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

5. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
2. Untuk menganalisis kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
3. Untuk menganalisis partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
4. Untuk menganalisis struktur desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
5. Untuk menganalisis sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Dari hasil penelitian diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi peneliti terhadap bukti empiris.
 - b. Dari hasil penelitian diharapkan menambah sumber referensi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Magelang dalam pengelolaan APBD.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah dalam penelitian ini bisa menjadikan suatu referensi, agar kinerja pemerintah menjadi *Good Governance*.

- b. Bagi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Magelang penelitian ini diharapkan menjadi referensi pegawai maupun pihak-pihak yang terkait dalam pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telah Teori

1. *Theory agency*

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*pricipal*) memerintah orang lain (*agen*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada *agen* membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini *agen* akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. (Jensen dan Meckling, 1976). Pada oragnisasi sektor publik yang dimaksud prinsipal adalah masyarakat dan *agen* dalam hal ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

2. *Stewardship theory*

Teori *stewardship* berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, dimana *steward* termotivasi untuk berkelakuan sesuai keinginan *principal*. Teori

stewardship adalah pengembangan kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya (Donaldson dan Davis, 1989). Pada organisasi sektor publik yang dimaksud prinsipal adalah masyarakat dan *steward* dalam hal ini adalah Organisasi Perangkat Daerah OPD).

Stewardship theory menjelaskan bahwa kepentingan bersama dijadikan dasar dari tindakan seorang manajer. Jika terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *steward*, maka *steward* akan berusaha bekerjasama karena bertindak sesuai dengan tindakan *principal* dan demi kepentingan bersama dapat menjadi pertimbangan yang rasional agar tercapainya tujuan bersama. *Stewardship theory* adalah manajer menyelaraskan tujuannya sesuai dengan tujuan *principal* namun tidak berarti *steward* tidak memiliki kebutuhan (Raharjo, 2007).

Darini (2005) menjelaskan bahwa amanah, memiliki integritas, bertindak jujur dan bertanggungjawab adalah sifat manusia yang dijadikan dasar dalam membangun *stewardship*. Hal ini berarti dalam pandangan *stewardship theory* manajemen dipercaya untuk bekerja dengan baik bagi kepentingan publik dan shareholder (Kaihatu, 2006).

Teori *stewardship* menjelaskan bentuk pola kepentingan dan hubungan para atasan dengan bawahannya dalam sebuah organisasi

menggunakan mekanisme situasional. Mekanisme ini meliputi filosofis manajemen dan perbedaan budaya organisasi, serta kepemimpinan dalam pencapaian tujuan bersama tanpa mengorbankan kepentingan masing-masing (Anton, 2010).

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2002) adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban.

4. Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran menurut Kenis (1979), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

5. Partisipasi Anggaran

Partisipasi anggaran menurut Nafarin (2007) menyatakan bahwa tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu didalam menentukan dan menyusun anggaran yang ada dalam

divisi atau bagiannya, baik secara periodik maupun tahunan.

6. Desentralisasi

Desentralisasi menurut Suwandi (2013) desentralisasi yaitu untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis.

7. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal menurut Arens (2008) adalah proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dan sasaran dalam kategori sebagai berikut: (1) keandalan laporan keuangan, (2) evektivitas dan efisiensi dari operasional, (3) pemenuhan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang bisa diterapkan.

8. Kinerja Manajerial

Kinerja manajerial menurut Mulyadi (2001) adalah hasil secara periodic operasional suatu manajer berdasarkan sasaran, standar, dan criteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil
1	Asrini (2017)	Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Partisipasi Penyusunan	Variabel Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran

	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil
		anggaran terhadap Kinerja Manajerial di Kota Palu.	berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial.
2	Candrakusuma dan Jatmiko (2017)	Dampak Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial di Kabupaten Sragen.	Variabel Komitemen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif Terhadap Kinerja Manajerial, sedangkan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Anggaran tidak berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial.
3	Wibowo dan Handayani (2017)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah Kota Surabaya.	Variabel Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Penyusunan Anggaran, dan Desentralisasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Manajerial.
4.	Aini (2016)	Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial di Kabupaten Kampar.	Variabel Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Manajerial.
5.	Solekhah, dkk (2016)	Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial di Kota Samarinda.	Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi dan Akuntabilitas Publik tidak berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial.

No	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil
6.	Matondang, dkk (2015)	Pengaruh Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial di Kabupaten Aceh Utara.	Variabel Perencanaan dan Penganggaran, Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial.
7.	Chintya (2015)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Solok.	Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial.
8.	Putri (2013)	Pengaruh Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Manajerial di Kota Padang	Variabel Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial

Sumber: data penelitian terdahulu diolah, 2018

C. Perumusan Hipotesis

1. Akuntabilitas pengaruh terhadap kinerja manajerial.

Akuntabilitas publik adalah bentuk pertanggungjawaban dalam proses anggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan yang harus benar-benar dapat dilaporkan. Berdasarkan teori agensi dimana agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Hubungan antara *principal* dan

agent dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) karena *agent* berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan *principal*, dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan *asymmetric information* yang dimilikinya akan mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal*. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya akuntabilitas dapat memberikan pertanggungjawaban dari anggaran yang digunakan.

Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Mardiasmo (2002), bahwa akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Apabila kinerja manajerial sudah menjalankan aturan dengan baik, maka kinerja manajerial akan menjadi baik. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Hal ini didasari dari penelitian Wibowo (2017), Asrini (2017) dan Aini (2016) menyatakan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₁ Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

2. Kejelasan sasaran anggaran pengaruh terhadap kinerja manajerial.

Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik. Berdasarkan teori *stewardship* pengembangan kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi bukan termotivasi dari kepentingan pribadinya, jika kedua belah pihak mempunyai tujuan yang sama maka *steward* akan bertindak sesuai dengan keinginan *principal*. Sehingga diharapkan dengan adanya kejelasan sasaran anggaran dapat mengetahui apakah anggaran sudah sesuai sasaran RKA-OPD yang diharapkan atau belum

Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Semakin baik kejelasan sasaran anggaran maka kinerja pemerintah yang dihasilkan oleh pemerintah juga akan semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kenis (1979). Sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab dalam melaksanakan mengenai tujuan, standar, jangka waktu, prioritas sasaran tingkat kesulitan dan koordinasi. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran maka aparat juga dapat menentukan target dalam mencapai anggaran dan merumuskan apa saja yang akan dilakukan sehingga apa yang telah

ditargetkan pada awalnya dapat terealisasi dengan baik. Hal ini didasari dari penelitian Wibowo (2017), Candrakusuma (2017), Asrini (2017), Aini (2017) dan Matondang (2017) menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₂ Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

3. Partisipasi anggaran pengaruh terhadap kinerja manajerial.

Partisipasi anggaran adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh kedua pihak atau lebih dalam menyusun anggaran. Berdasarkan teori *stewardship* kepentingan dan hubungan antara atasan dan bawahan dalam sebuah organisasi menggunakan mekanisme situasional meliputi filosofis manajemen, perbedaan budaya organisasi, dan kepemimpinan dalam pencapaian tujuan bersama tanpa mengorbankan kepentingan masing-masing. Sehingga diharapkan dengan adanya partisipasi anggaran semua anggota dapat terlibat dari atasan hingga bawahan sehingga ada rasa kesungguhan dalam menyusun anggaran.

Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Dengan adanya partisipasi aparat pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran pemerintah daerah dimana

menunjukkan seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah yang terlibat dalam proses penganggaran. Hal ini didasari ketika suatu tujuan atau sasaran yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka para penyusun akan mempertanggung jawabkan dan memiliki rasa sungguh-sungguh untuk mencapainya. Dengan adanya bawahan ikut serta dalam proses penyusunan anggaran, para bawahan akan merasa puas, produktif, dan dihargai oleh suatu organisasi, dengan begitu partisipasi anggaran mampu membentuk perilaku karyawan dan rasa memiliki terhadap organisasi serta menumbuhkan pengaruh motivasional terhadap tujuan anggaran. Hal ini didasari dari penelitian Wibowo (2017), Asrini (2017) dan Matondang (2017) menyatakan partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₃ Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

4. Desentralisasi pengaruh terhadap kinerja manajerial.

Desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang pada level bawah pada suatu organisasi. Berdasarkan teori *stewardship* jika kedua belah pihak mempunyai tujuan yang sama maka *steward* akan bertindak sesuai dengan keinginan *principal*.

Sehingga dengan adanya struktur desentralisasi diharapkan dapat lebih mudah untuk mengambil keputusan.

Desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Dengan adanya otonomi daerah, tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat semakin baik. Hal ini menegaskan bahwa dengan adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan yang terdesentralisasi akan lebih meningkatkan kinerja manajerial pada suatu organisasi. Hal ini didasari dari penelitian Wibowo (2017), menyatakan desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₄ Desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

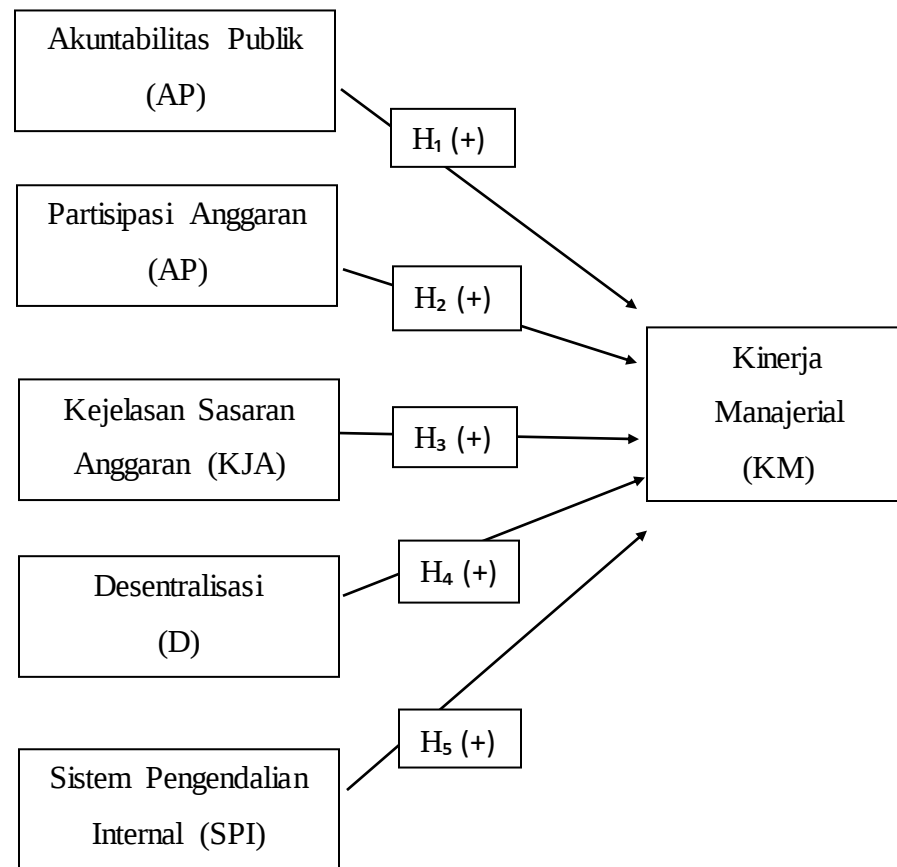
5. Sistem pengendalian internal pengaruh terhadap kinerja manajerial.

Sistem Pengendalian Intern merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Berdasarkan teori *stewardship* jika terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *steward*, maka *steward* akan berusaha bekerjasama karena bertindak sesuai dengan tindakan *principal* dan demi kepentingan bersama dapat menjadi pertimbangan yang rasional agar tercapainya tujuan bersama.

Sehingga diharapkan dengan adanya Sistem Pengendalian Internal dapat mengetahui dana publik yang digunakan oleh pemerintah daerah dan mampu mengendalikan permasalahan yang ada dalam organisasi, sehingga didalam organisasi menjadi lebih baik.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Dengan adanya pengendalian intern maka seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimpin dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik. Hal ini didasari dari penelitian Candrakusuma (2017), Chintya (2017) dan Putri (2013) menyatakan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₅ Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

D. Model Penelitian

Gambar 1
Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keberadaan kelompok orang, kejadian, hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah para manajerial yang bekerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Magelang. Populasi diambil pada wilayah tersebut karena masih rendahnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten tersebut, sehingga kuesioner akan dibagikan secara langsung oleh peneliti.

Menurut Sekaran (2006) sampel adalah sebagian dari populasi tersebut, sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel secara disengaja dengan kriteria sesuai dengan penelitian. Penilaian kriteria sampling meliputi:

1. Memiliki masa kerja minimal minimal satu tahun.
2. Menduduki posisi jabatan sebagai Kepala Dinas atau Kepala Badan, Kepala Subbagian Keuangan, Bendahara, Pejabat penatausahaan keuangan dan Staf Akuntansi / keuangan / pembukuan sebagai unit analisis.

Sampel dalam penelitian ini adalah kepala manajer pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Magelang yang

bertugas dan bertanggung jawab pada kegiatan yang dilakukan melalui program kerja, serta yang terlibat dalam penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan dalam APBD

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah menggunakan data primer. Menurut Sugiyono (2012) data primer adalah data yang langsung diambil dari sumber asli tanpa adanya perantara yang didapat langsung dari responden. Data primer menjadi pilihan dalam mengumpulkan data karena data diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan pada aparatur pemerintah daerah seluruh manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bekerja di lingkup pemerintah Kabupaten Magelang yang terlibat dalam penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan memberikan langsung kuesioner kepada responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu pihak-pihak yang ikut serta dalam penyusunan anggaran pada setiap dinas/OPD pemerintah Kabupaten Magelang. Kuesioner akan diambil pada waktu dan tanggal yang disepakati oleh peneliti dan responden. Kuesioner yang diisi oleh responden, diseleksi terlebih dahulu sesuai dengan kriteria dalam penelitian.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3
Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator Variabel
1.	Kinerja Manajerial	Kinerja manajerial menurut Mulyadi (2001) kinerja manajerial adalah hasil secara periodik operasional suatu manajer berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.	perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, penilaian staf, negosiasi dan perwakilan diukur dengan skala likert 1-5
2.	Akuntabilitas Publik	Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (<i>steward</i>) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (<i>principal</i>) yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.	kebijakan, program, manajerial, manfaat, horizontal, perencanaan, proses, hukum, keuangan diukur dengan skala likert 1-5
3.	Kejelasan Sasaran Anggaran	Kejelasan sasaran anggaran menurut Kenis (1979), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan	Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006. Pemberian kewenangan dalam menentukan jumlah anggaran, program

No	Variabel	Definisi	Indikator Variabel
		tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.	dan kegiatan, keterlibatan pegawai, skala prioritas, penambahan dan mutasi pegawai.
4.	Partisipasi Anggaran	Partisipasi anggaran menurut Nafarin (2007) menyatakan bahwa tingkat seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh individu didalam menentukan dan menyusun anggaran yang ada dalam divisi atau bagiannya, baik secara Periodic maupun tahunan.	sejauh mana anggaran dipengaruhi oleh keterlibatan para pengurus, alasan-alasan penolakan pihak manajer pada saat anggaran diproses, keinginan memberikan partisipasi anggaran kepada pihak manajer tanpa diminta, sejauhmana manajer mempunyai pengaruh dalam anggaran akhir, kepentingan manajer dalam partisipasinya terhadap anggaran, anggaran didiskusikan antara pihak manajer puncak dan manajer pusat pada saat anggaran disusun diukur dengan skala likert 1-5
5.	Desentralisasi	Desentralisasi menurut Suwandi (2013) desentralisasi yaitu untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publi	pengambilan keputusan, tingkat desentralisasi, pertanggungjawaban, pemutusan hubungan kerja dan wewenang diukur dengan skala likert 1-5

No	Variabel	Definisi	Indikator Variabel
6.	Sistem Pengendalian Internal	Sistem pengendalian internal menurut (Arens, 2008) adalah proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dan sasaran dalam kategori sebagai berikut: (1) keandalan laporan keuangan, (2) efektivitas dan efisiensi dari operasional, (3) pemenuhan hukum peraturan yang diterapkan.	Lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi diukur dengan skala likert 1-5

Sumber: data penelitian dan pengukuran variabel, 2018

D. Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian maksimum, minimum, sum, *range*, *kurtosis* dan *skewness* atau kemencengan distribusi (Ghozali, 2016:48).

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid dan tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016:52). Menguji validitas instrumen kuesioner penelitian ini

menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). *Confirmatory Factor Analysis* digunakan untuk menguji apakah suatu variabel mempunyai unidimensionalitas atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah variabel. Analisis faktor konfirmatori dapat menguji apakah indikator benar-benar merupakan indikator dari variabel tersebut. Analisis faktor konfirmatori akan mengelompokkan masing-masing indikator ke dalam beberapa faktor apabila indikator yang digunakan merupakan indikator konstruk, kemudian akan mengelompok menjadi satu dengan faktor loading yang tinggi.

Ketika pada pengelompokkan terdapat kesulitan dalam menginterpretasikan maka perlu dilakukan rotasi. Alat penting untuk interpretasi faktor adalah *factor rotation*. Rotasi ortogonal melakukan rotasi dengansudut 90 derajat, sedangkan rotasi yang tidak 90 derajat disebut oblique rotation. Rotasi orthogonal dapat berbentuk Quartimax, Varimax, Equimax dan Promax (Ghozali, 2016:55).

Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Uji Bartlett of Sphericity merupakan uji statistik untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel. Semakin besar sampel menyebabkan Bartlett test semakin sensitif

untuk mendeteksi adanya korelasi antara variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus $> 0,50$ dan cross loading > 0.50 untuk dapat dilakukan analisis faktor (Ghozali, 2016:57).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dilakukan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji realibilitas dimaksud untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama (Cong & Chong, 2002; Ghozali, 2016:43).

Pengujian Ghozali (2016) reliabilitas dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian dilakukan dengan menghitung *croanbach's alpha* dari masing-masing instrument dalam suatu variabel. Instrumen yang dipakai dalam variabel tersebut dikatakan handal/reliabel, jika

memberikan nilai *croanbach's alpha* lebih dari 0,70 (Ghozali, 2016:43).

c. Analisis Regresi berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel depende. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel depende dengan suatu persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan dua tujuan sekaligus: pertama, meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Penelitian ini untuk menguji keseluruhan hipotesis digunakan model regresi sebagai berikut:

$$KM = \alpha + \beta_1 AK + \beta_2 KSA + \beta_3 PA + \beta_4 D + \beta_5 SPI + e$$

KM = Kinerja Manajerial

α = Nilai intersep (konstan)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Koefisien Regresi

AK = Akuntabilitas Publik

KSA = Kejelasan Sasaran Anggaran

PA = Partisipasi Anggaran

D = Struktur Desentralisasi

SPI = Sistem Pengendalian Internal

e = *error*

E. Pengujian Hipotesis

1. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

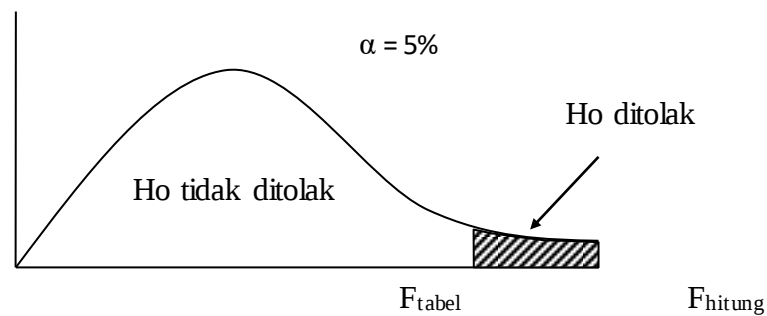
Menurut Ghozali (2016:98), koefisien determinasi R^2 untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi R^2 adalah antara nol sampai 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai R^2 mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

2. Uji F (*Goodness of Fit*)

Ghozali (2016:99) Uji statistik F digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*goodness of fit*). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak. Menentukan F tabel digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang (df_1) = k dan derajat kebebasan penyebut (df_2) = $n - k - 1$, dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan kriteria:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $p\text{ value} < \alpha = 0,05$, maka model yang digunakan dalam penelitian bagus (*fit*).
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $p\text{ value} > \alpha = 0,05$, maka model yang digunakan dalam penelitian tidak bagus (*tidak fit*).

Perbandingan nilai kritis yang diperoleh ini selanjutnya akan dikonfirmasi dengan nilai tabel sesuai dengan ketentuan dalam



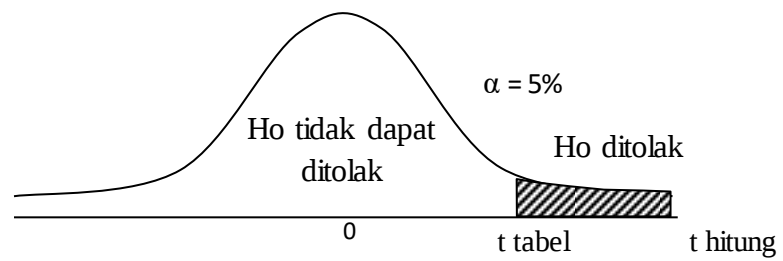
Gambar 3
Penerimaan Uji F

3. Uji t

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:99). Tujuan pengujian dengan uji t adalah untuk mengetahui koefisien regresi signifikan atau tidak, uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Menentukan nilai t tabel digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = n - 1$. Kriteria pengujian adalah:

- 1) Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $p \text{ value} < 0,05$ maka H_0 tidak diterima dan H_a diterima, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $p\text{ value} > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a tidak diterima, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 4
Penerimaan Uji t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, desentralisasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja manajerial. Sampel yang digunakan dalam penelitian di OPD Kabupaten Magelang sebanyak 69 responden. Hasil analisis data yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji R^2 menunjukkan bahwa kemampuan variabel penerapan akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, desentralisasi, dan Sistem Pengendalian Internal dalam menjelaskan variabel kinerja manajerial sebesar 54% sedangkan sisanya sebesar 46% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian ini.
2. Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini baik.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Sementara akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan kesemua objek mengenai kinerja manajerial pemerintah daerah.
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, partisipasi anggaran, desentralisasi, dan sistem pengendalian internal. Sedangkan masih ada variabel lain yang perlu ditinjau kembali yang mempengaruhi kinerja manajerial.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya OPD se-wilayah karisidenan kedu sehingga dapat dijadikan generalisasi secara kesemua objek mengenai kinerja manajerial pemerintah daerah.
2. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah misalnya kompetensi sumberdaya manusia dan komitmen organisasi.

Daftar Pustaka

- Aini, F. S. (2016). Pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial. *JOM Fekon*, 3(1).
- Aren, Alvin A, Randal J, Beasley, dan Mark S. 2008. Auditing dan Jasa Assurance. Edisi kedua belas. Jakarta: PT Indeks IKPI
- Asrini. (2017). Pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja skpd di pemerintah daerah kota palu. *ISSN*, 5, 52–58.
- Bangun, A, 2009, *Pengaruh Partisipasi Penyusunan dalam Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Moderating*, Skripsi, Medan
- Candrakusuma, D. A., & Jatmiko, B. (2017). Dampak komitmen organisasi, sistem pengendalian intern pemerintah, akuntabilitas publik, partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial. *ISSN*, 24(1), 87–93.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- <http://www.menpan.go.id/berita-terkini/2233-akuntabilitas-kinerja-manado-dan-badung-b-damping-sukabumi-dan-sleman>, diakses 14 Desember 2017
- <https://www.magelangkab.go.id>
- <http://www.semarang.bpk.go.id>, diakses 11 Mei 2018
- Irine, C. (2015). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja instansi pemerintah di kota solok (Studi pada SKPD Kota Solok).
- James H. Davis, F. David Scoorman dan Lex Donalson. 1997. “*Toward a Stewardship Theory of Management.*” *Academy of Management Review* Vol. 22, No. 1, page 2247, 1997.
- Jensen dan Meckling. 1976. The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial and Conomic*, 3:305-360.

- Kenis, I. 1979. Effect on Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review*, Vol. LIV, No. 4, pp: 707-
- Mantondang, N. I., Basri, H., & Muhammad, A. (2015). Pengaruh sinkronisasi perencanaan dan. *ISSN*, 4(4), 36–45.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat
- M. Nafarin. 2007. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi Revisi. Jakarta : Salemba Empat
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 13 Tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian dalam negeri dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Pemerintah
- Putra, D. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Putri, G. Y. (2013). *Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Terhadap Kinerja Manajerial Skpd (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)*. Universitas Negeri Padang.

Sekaran, U. (2006). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis, Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.

Solekhah, Y., Ruliana, T., & Laif, I. N. (1945). Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi dan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial skpd.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suwandi, Annisa Pratywi. 2013. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi Terhadap kinerja pemerintah daerah SKPD Kota Padang. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

Wibowo, A. P., & Nur, H. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah kota surabaya. *ISSN*, 6.

www.bpkp.go.id